

## Sisi Terang Pandemi COVID-19

Yulia Indri Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, [yulia.sari@unpar.ac.id](mailto:yulia.sari@unpar.ac.id)

*"Every person, in every nation, needs to do their part. This realisation led to our turning point of disease control in West Africa"*  
(Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia, 2005-2017)

Pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan status virus corona menjadi pandemi global. Berdasarkan data statistik dunia, sampai dengan 2 April 2020 jumlah kasus penderita COVID-19 telah mencapai 2.482.044 dan jumlah kematian 170.456 jiwa di 210 negara<sup>1</sup>. Status pandemi global saat ini bukan yang pertama. Berdasarkan informasi dari website WHO<sup>2</sup>, pandemi influenza terjadi di tahun 2009-2010 yang disebabkan oleh virus influenza A (H1N1); 1957-1958 yang disebabkan oleh virus A (H2N2)) dan pada 1968 ("Ho"). Pandemi yang paling parah adalah apa yang disebut "Flu Spanyol" (disebabkan oleh virus A [H1N1]), diperkirakan telah menyebabkan 20-50 juta kematian pada tahun 1918-1919.

Walaupun tingkat fatalitas kematian akibat terpapar COVID-19 lebih rendah dibandingkan dengan A H1N1, mudahnya penularan virus COVID-19 antar manusia menyebabkan jumlah akumulatif kematian pasien COVID-19 lebih besar dan berbagai dampak lanjutan bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Satu-satunya cara memutus mata rantai penyebaran virus ini adalah dengan pembatasan jarak antar manusia. Penerapan

kebijakan menjaga jarak ini —karantina wilayah maupun pembatasan sosial— telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap berbagai industri terutama manufaktur, pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Selain itu, trauma dan kehilangan orang-orang yang disayangi, ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir menyebabkan ketakutan, kepanikan, yang mempengaruhi kesehatan mental manusia.

Dalam kondisi serba sulit ini, negara dianggap lambat mengatasi pandemi beserta masalah-masalah ekonomi sosial yang menyertainya. Pemberitaan di berbagai media massa seringkali mengungkapkan "kegagalan" negara baik di negara maju dan berkembang untuk menetapkan dengan tegas kebijakan karantina wilayah dan kebijakan jaminan sosial untuk melindungi mereka yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Beberapa negara bahkan dianggap meremehkan bahaya penyebaran COVID-19 dan lebih memilih mengamankan sektor ekonomi. Pilihan ini tentunya dilematis dan tidak mudah diambil.

Tulisan ini mengungkapkan opini penulis mengenai peran masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi non pemerintah (ornop), organisasi sosial masyarakat, komunitas, dan individu untuk mengisi dan melengkapi peran negara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 berikut mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah di Indonesia. Penulis mengangkat

<sup>1</sup> COVID-19 Coronavirus Pandemic update, diakses tanggal 21 April 2020, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

<sup>2</sup> World Health Organization Europe, Past Pandemics, diakses tanggal 21 April 2020,

<http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza/past-pandemics>

bahwa pandemi COVID-19 memunculkan kesadaran kolektif dan kesadaran akan ketidaksetaraan. Penulis ingin menekankan bahwa temuan ini tidak diperoleh melalui riset yang sistematis, melainkan berdasarkan pengamatan terhadap kerja-kerja jaringan organisasi non-profit (ornop) dan komunitas dalam jaringan pertemanan penulis beserta berita-berita di media sosial dan media massa.

### **Kesadaran kolektif**

Gagasan kesadaran kolektif berasal dari sosiolog Prancis Emile Durkheim yang menjelaskan bagaimana seorang individu bisa melihat bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat luas yang memungkinkan masyarakat bekerja sama dalam banyak hal dan karenanya menjadi fondasi berfungsinya sebuah negara. Durkheim pertama kali memperkenalkan teorinya tentang kesadaran kolektif dalam bukunya tahun 1893 yang berjudul *"The Division of Labor in Society"*<sup>3</sup>. Durkheim menjelaskan bahwa dalam masyarakat industri modern yang dicirikan melalui keragaman identitas masyarakat saling membagi peran (spesialisasi pekerjaan) yang membuat mereka saling tergantung satu sama lain. Pada konteks ini, solidaritas yang terjadi adalah "solidaritas organik" yang tidak dibangun berdasarkan relasi kekerabatan atau ritual kepercayaan yang homogen, melainkan oleh hukum atau norma yang mengatur hubungan antar individu tersebut.

Kesadaran kolektif masyarakat di era industri modern dan terutama dalam konteks informasi teknologi saat ini dinilai "lemah". Berkurangnya fungsi keluarga, fungsi kerabat, fungsi tatap muka dan relasi dengan tetangga digantikan oleh berbagai aturan di tengah dunia yang marak penggunaan media daring menyebabkan banyak individu tidak lekat dengan kolektivitas di sekitarnya. Situasi ini ditambah dengan situasi politik yang terjadi di

Indonesia beberapa tahun terakhir yang menciptakan disintegrasi dan polarisasi sosial. Situasi yang terjadi saat ini seperti diistilahkan oleh Durkheim adalah "anomi", kekacauan yang terjadi karena individu tidak merasa menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Situasi saling menyalahkan, saling bertikai antar kelompok — dengan memobilisasi identitas agama, identitas pilihan politik, identitas etnis—mewarnai berbagai kehidupan sosial antar individu. Di kegiatan sehari-hari, situasi menurunnya kesadaran kolektif terlihat dari contoh-contoh kasus individu yang melanggar antrian, mereka yang sehat duduk dan memilih duduk kursi khusus difable, membuang sampah sembarangan, melakukan penghinaan atas bentuk dan berat tubuh (*body shaming*), pelecehan seksual, dan kasus-kasus perundungan.

Dalam situasi ketidaklekatan kolektifitas, pandemi COVID-19 memberikan "struktur baru" yang membuat manusia harus bekerja kolektif untuk memastikan perubahan perilaku secara kolektif sebagai satu-satunya cara memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mudahnya penularan virus COVID-19 dan efek kemungkinan mematikan bagi mereka yang terpapar menyebabkan virus ini yang mengendalikan kecepatan penambahan pasien baru yang bergerak secara eksponensial. Berbagai lembaga kesehatan telah menyimpulkan bahwa penurunan penyebaran virus COVID-19 sangat tergantung pada perubahan perilaku seluruh manusia untuk mencuci tangan, memakai masker saat berinteraksi, melakukan karantina sendiri, dan menjaga jarak fisik. Jika perubahan perilaku tidak terjadi secara kolektif, konsekuensinya tidak hanya berdampak bagi kematian dan trauma mereka yang ditinggalkan, tapi juga terhadap berbagai kehidupan ekonomi, sosial dan kesehatan mental masyarakat.

---

<sup>3</sup> Durkheim, E. & Simpson, G. (1997). *The Division of Labour in Society*. Free Press.

Di situasi sulit ini, kita sedang menyaksikan sebuah gerakan yang muncul dari kalangan masyarakat sipil untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat secara meluas untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Tindakan-tindakan mencuci tangan, memakai masker misalnya adalah tindakan yang harus dilakukan setiap individu tetapi membutuhkan dorongan kolektif untuk memastikan setiap individu melakukan hal tersebut. Dugaan bahwa orang lain mungkin tidak mengubah perilakunya mendorong berbagai pihak memfasilitasi upaya-upaya perubahan perilaku yang diharapkan. Gerakan ini tidak hanya diinisiasi oleh kelompok yang terorganisir seperti ornop dan organisasi sosial masyarakat, tapi juga dilakukan oleh berbagai individu-individu dan kelompok lintas kelas.

Sebagai contoh adalah gerakan pemberian bantuan alat-alat untuk mencegah penularan seperti masker, sabun cuci, penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) dan ruang cuci publik<sup>4</sup>. Palang Merah Indonesia, Care Indonesia, Caritas Indonesia, Aksi Cepat Tanggap Forum Zakat, Catholic Relief Services (CRS), Al Khair Indonesia, Dompot Dhuafa, Ibu Foundation, Jaringan Gusdurian Peduli, Wahana Visi Indonesia, dan Yayasan Buddha Tzu Chi adalah sebagian kecil contoh ornop dan organisasi sosial masyarakat yang secara responsif bergerak menyediakan alat-alat kesehatan untuk publik. Berbagai yayasan berbasis agama seperti Forum Zakat misalnya dengan tegas menyatakan bahwa penyediaan alat tersebut diberikan tanpa memandang status dan agama. Kelompok akademisi dari berbagai universitas termasuk Universitas Katolik Parahyangan juga menjadi bagian yang bergerak dalam penyediaan alat-alat kesehatan untuk publik.

Selain di tingkat ornop, organisasi sosial masyarakat dan universitas yang merupakan lembaga terorganisir dengan sumber daya yang memadai untuk melakukan kegiatan sosial secara cepat dan responsif, pandemi ini juga memunculkan inisiatif-inisiatif di tingkat komunitas dan individu. Kelompok ibu-ibu di lingkungan saya tinggal mendistribusikan masker kepada pemulung, petugas satpam, pengemudi ojek daring (biasa disebut ojol), pedagang sayur keliling, tukang sol sepatu keliling, pedagang makanan keliling dan kelompok-kelompok lainnya. Kolektifitas ibu-ibu ini juga terjadi di banyak tempat. Di jalan kerap ditemui penumpang kendaraan bermotor dan roda empat yang memberikan masker kepada pengemudi ojol yang sedang mangkal, pemulung, pedagang, pengamen dan kelompok lainnya. Berbagai kelompok masyarakat juga berinisiatif membuat tempat cuci tangan publik yang bisa digunakan siapapun yang melewati daerah tersebut. Gerakan #membagikanmasker menggaung di berbagai kalangan dan tersebar di berbagai media sosial.

Gerakan kolektif lain adalah berupa penyebaran informasi mengenai perubahan perilaku untuk menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar, memakai masker dan mencegah orang berkumpul. Berbagai ornop dan universitas melakukan edukasi dan promosi kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Kelompok ibu-ibu di lingkungan saya tinggal, dengan gaya khasnya mereka juga dengan sabar menjelaskan pentingnya memakai masker dan memberikan contoh mencuci tangan terhadap berbagai kelompok di sekitar lingkungan. Berbagai ornop membuat poster dan bentuk visual mengenai bagaimana mencuci tangan dengan baik. Kelompok-kelompok individu secara kreatif dan inovatif membuat video youtube mendorong setiap individu memakai masker, diam di rumah dan

---

<sup>4</sup> Berdasarkan data yang dikompilasi oleh Desk Relawan Penanggulangan Bencana, bersama MPBI, MDMC, dan UNOCHA.

cara mencuci tangan dengan benar. Tokoh agama juga bergerak memberikan penjelasan pentingnya beribadah di rumah. Ayah saya sendiri secara rutin menelepon teman-teman lansianya dan saling mendukung untuk tidak ke masjid dahulu untuk beribadah. Linimasa media sosial dipenuhi dengan status-status yang mengajak orang untuk tidak berpikir egois, bahwa keputusan yang diambil (terkait beribadah di luar, berkumpul, tidak memakai masker, tidak mencuci tangan) akan berdampak bagi orang lain.

Selain contoh dua gerakan yang secara masif dilakukan masyarakat sipil baik kelompok yang terorganisir maupun di tingkat individu dan komunitas, masih banyak contoh-contoh gerakan lainnya seperti menggalang dana untuk penyediaan APD medis, membuat database informasi, membuka konsultasi daring, penyadaran informasi untuk tidak mengucilkan mereka yang terpapar, penyadaran informasi mengenai berita-berita bohong mengenai covid-19 untuk mencegah kepanikan di masyarakat, dan berbagai gerakan-gerakan lainnya. Semua ini mengindikasikan benih dan menguatnya kesadaran untuk bertindak atas dasar kebaikan bersama (kolektif).

### **Kesadaran akan ketidaksetaraan**

Selaras dengan tumbuhnya kesadaran kolektif, pandemi COVID-19 juga menguatkan kesadaran akan ketidaksetaraan dan keberpihakan bagi kelompok terdampak. Kebijakan mengatasi pandemi yang berupa karantina wilayah dan pembatasan sosial menguatkan ketidaksetaraan yang ada di masyarakat. Ketimpangan terjadi antara pekerja kerah putih yang memiliki akses dan bisa bekerja di rumah dan tetap diupah, mereka yang mampu diam di rumah karena memiliki cukup tabungan dan persediaan makanan, mereka yang memiliki kendaraan pribadi dan akses ke luar dengan aman dan mereka yang tidak. Banyak kelompok yang tidak memiliki keistimewaan untuk diam di rumah. Masih

banyak kelompok yang terpaksa bekerja di luar rumah untuk bisa makan dan pekerja-pekerja yang harus bekerja di luar rumah dengan menggunakan kendaraan umum.

Selain memunculkan ketidaksetaraan atau ketimpangan sosial, pandemi ini juga memunculkan kelompok-kelompok miskin, rentan dan tertinggal baru. Di tingkat makro, institusi finansial telah memprediksi bahwa dampak ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19 lebih buruk daripada krisis ekonomi Asia 1997-98 dan krisis finansial global 2008. Kebijakan karantina dan pembatasan sosial berdampak terhadap berbagai industri terutama di sektor wisata, perdagangan (terutama non-pangan dasar), perhotelan, angkutan atau jasa transportasi, restoran, kedai kopi, dan pertanian. Berhentinya sektor-sektor tersebut mengakibatkan jutaan orang mengalami penurunan penghasilan dan bahkan kehilangan pekerjaan dalam jangka waktu yang tidak bisa diprediksi.

Dalam situasi ketimpangan, kita menyaksikan munculnya kesadaran masyarakat di berbagai kalangan atas kondisi ketidaksetaraan dan bertindak dalam kapasitas mereka untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Strategi-strategi yang dilakukan masyarakat sipil untuk mengurangi dampak ekonomi terbagi atas tiga strategi.

Strategi yang pertama dan lebih banyak dilakukan adalah pembagian bahan pokok atau sering disebut “sembako” kepada masyarakat yang paling rentan dan terdampak pandemi. Berbagai kelompok masyarakat sipil baik dari kelompok ornop, organisasi sosial masyarakat, universitas dan individu-individu mendistribusikan bahan pangan kepada kelompok-kelompok miskin, kelompok difabel dan lansia, pengemudi ojol, angkutan umum dan juga pedagang-pedagang kecil. Beberapa mahasiswa/i Universitas Katolik Parahyangan membangun gerakan yang diberi nama “Kasih Balik”. Melalui kampanye peningkatan kesadaran, gerakan ini mengajak pengguna

internet untuk berkontribusi dalam berbagi kebaikan kepada yang saat ini membutuhkan akan makna dari #KasihBalik baik dalam bentuk kegiatan membagi-bagi bahan pokok maupun mendorong anak muda untuk memikirkan bentuk-bentuk kreatif menjaga kebutuhan ekonomi masyarakat kecil.

Strategi lain adalah melalui gerakan untuk tetap menjaga roda ekonomi lokal dan memastikan kelompok ekonomi kecil dan rumah tangga masih memiliki pendapatan. Kelompok masyarakat sipil menyerukan gerakan untuk tetap membeli barang —pangan, bahan pangan, masker, pakaian — dari pedagang kecil, industri rumah tangga, kedai kopi dan termasuk restoran untuk menjaga tidak terjadi penghentian kerja buruh restoran. Termasuk dalam gerakan ini adalah ajakan untuk tetap membeli barang atau pangan dengan menggunakan aplikasi online seperti “Go/Grabfood”, “Go-send” sehingga menjaga penghasilan kelompok angkutan ini. Salah satu contoh inisiatif yang dilakukan beberapa mahasiswa/i Unpar adalah gerakan “*Get Food for Green Troops*”. Gerakan tersebut menargetkan kelompok ojol dan pedagang kecil dengan mekanisme membeli makanan dari pedagang kecil melalui aplikasi daring dan memberikan makanan tersebut kepada pengemudi ojol. Inisiatif ini membantu terjaganya penghasilan dua pihak yaitu pedagang kecil dan pengemudi ojol. Dalam kehidupan sehari-hari, saya mengenal kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya yang berkomitmen untuk terus membeli kebutuhan pangan dari pedagang sayur keliling dan pedagang kecil lainnya sebagai cara menjaga penghasilan kelompok ini tanpa merendahkan martabat mereka.

Selain itu, berbagai ornop, organisasi sosial masyarakat dan individu di masyarakat memfasilitasi kelompok-kelompok terdampak seperti petani dan penjual makanan untuk memasarkan melalui mekanisme daring.

Sebagai contoh adalah Dompok Dhuafa<sup>5</sup> yang memfasilitasi 12 petani kecil di Lembang untuk memasarkan secara daring setelah mengalami penurunan pasar karena penutupan restoran-restoran di Bandung dan Jakarta yang menjadi konsumen terbesar mereka. Dari pengamatan di berbagai linimasa media sosial dan jaringan pertemanan, banyak individu yang berinisiatif membantu memasarkan berbagai produk jualan teman, tetangga atau kerabat yang tidak lagi memiliki penghasilan akibat pandemi.

## Kesimpulan

Pandemi COVID-19 telah memunculkan peran penting masyarakat sipil untuk mengisi kekesongan pemerintah merespon bencana nasional dan global ini. Kepemimpinan nasional dan negara yang kuat memang dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 dan mengatasi dampak dari kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial di berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama di aspek ekonomi dan sosial. Tetapi hal tersebut perlu disertai dengan inisiatif dan tindakan masyarakat untuk saling mendukung, mengingatkan akan pentingnya bertindak dan mengubah perilaku sebagai bagian dari kesadaran kolektif. Menyadari bahwa individu adalah bagian dari masyarakat yang lebih luas.

Di balik beratnya dampak, kondisi suram, ketakutan dan ketidakpastian bertahan menghadapi pandemi ini, tindakan kolektif telah tumbuh. Begitu pula dengan kesadaran akan ketidaksetaraan dan bertindak atas ketidaksetaraan itu. Pandemi COVID-19 ini menyadarkan dengan cara yang “keras” bahwa nasib manusia saling tergantung satu sama lain. Virus ini telah menunjukkan dan memunculkan cara penting untuk menyelesaikan persoalan secara kolektif dan membuka mata terhadap mereka yang tidak memiliki keistimewaan. Cara ini yang jika dipertahankan dan dikuatkan

---

<sup>5</sup> Wawancara tertulis dengan Apri, Dompok Dhuafa, tanggal 19 April 2020.

akan membangun struktur baru kekuatan masyarakat sipil menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.